

# **SOSOK PRESIDEN IDEAL DAN TANTANGAN ISU-ISU GLOBAL: MENIMBANG ASPEK KEPEMIMPINAN CAPRES PADA PILPRES 2014**

## ***FIGURE OF IDEAL PRESIDENT AND GLOBAL ISSUES CHALLENGE: CONSIDERING OF LEADERSHIP ASPECTS IN PRESIDENTIAL ELECTION 2014***

**Siswanto**

Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta  
*E-mail: sish\_jakarta@yahoo.com*

Diterima: 10 Juli 2013; direvisi: 3 September 2013; disetujui: 2 Desember 2013

### ***Abstract***

*The 2014 Presidential Election is near, but not yet seen the right candidate to lead Indonesia in the future. This paper is intended to contribute to the discourse about the 2014 presidential election in relation to the pressures of globalization. This effort to invite the community in determining the future of Indonesia by way of selecting the right candidate in the 2014 presidential election. The focus of this paper is the problem of momentum 2014 presidential election that took place in the midst of a crisis of national leadership, while the challenges of globalization increasingly heavy and diverse. Finally, the conclusions of this paper that the Indonesian Presidents in the past have shown a real contribution to the world and the corresponding challenges of each era, then what is the future President was also able to give a real contribution to the global issues of today.*

**Keywords:** *Leadership, Globalization, the Presidential election*

### **Abstrak**

Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 sudah dekat, tetapi belum nampak calon presiden (capres) yang tepat yaitu punya kepribadian kuat, cerdas, dan menjunjung tinggi etika sehingga mampu memimpin dengan efektif dan menjawab tantangan global. Tulisan ini dimaksudkan ingin berkontribusi dalam diskursus tentang Pilpres 2014 dalam kaitannya dengan tekanan arus globalisasi yang melanda Indonesia. Upaya ini mengajak masyarakat ikut menentukan masa depan Indonesia dengan cara memilih capres secara benar yaitu sesuai dengan kriteria di atas pada Pilpres 2014 mendatang. Fokus tulisan ini adalah masalah momentum Pilpres 2014 yang berlangsung di tengah krisis ketersediaan kader kepemimpinan nasional yang relevan dengan tantangan global. Akhirnya, tulisan ini berpegang pada hukum bahwa peristiwa sejarah tidak berulang, tetapi polanya bisa berulang. Presiden-Presiden Indonesia di masa lalu telah memberi kontribusi kepada permasalahan dunia, maka Presiden Indonesia di masa depan seharusnya juga mampu menjawab tantangan global agar juga punya kontribusi kepada dunia.

**Kata kunci:** kepemimpinan, globalisasi, Pemilu Presiden

## **Pendahuluan**

Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 sudah diambang pintu, tetapi belum nampak calon presiden (capres) yang dinilai tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Yang dimaksud Presiden yang tepat di sini adalah capres yang punya kaliber kepemimpinan di tingkat nasional dan

internasional, punya sifat kepemimpinan yang kuat, demokratis, dan mampu berperan penting dalam isu-isu global. Lebih jauh, Presiden Indonesia ke depan diharapkan juga mampu memperjuangkan kepentingan nasional dengan baik di tengah tekanan globalisasi yang kuat. Dalam hal ini, kepentingan nasional yang dimaksud berdimensi ekonomi, politik dan

budaya. Oleh karena itu, upaya ini termasuk di dalamnya memperjuangkan investasi, perdagangan, pertahanan, keamanan, stabilitas, kebebasan, kebhinekaan, kebangsaan, adat dan kebudayaan. Jadi, capres dengan kualifikasi di atas dianggap sebagai capres yang tepat dan ditunggu-ditunggu oleh rakyat Indonesia.

Gagalnya kaderisasi kepemimpinan di partai politik adalah salah satu faktor langkanya capres berkualitas. Partai-partai di Indonesia gagal menyiapkan pemimpin nasional yang tangguh. Pemimpin nasional Indonesia sekarang umumnya perilaku politiknya sulit dikatakan baik oleh rakyatnya yaitu dengan ukuran-etika politik, idealisme, dan keberpihakannya kepada rakyat. Boleh dibilang, Indonesia pascaReformasi mengalami krisis kepemimpinan. Dalam level nasional tidak dijumpai pemimpin yang mampu memberi suri tauladan dan punya ciri seorang negarawan. Apalagi, undang-undang memberi monopoli kekuasaan kepada partai politik dalam soal Pilpres sehingga menutup pintu bagi calon independen, padahal ini penting untuk munculnya calon presiden yang bebas dari “utang budi politik” kepada partai. Masyarakat sudah mengetahui bahwa partai bisa digunakan menjadi kendaraan politik untuk Pilpres, tetapi dengan konsekuensi menyeter “*fee*” tertentu. Kalau fenomena “kendaraan politik” ini adalah bagian dari kehidupan politik Indonesia maka sulit mencari pemimpin yang punya ciri seorang negarawan.

“Satrio Piningit” mungkin bisa menjadi capres alternatif diantara capres-capres yang ada, tetapi hal ini tidak membuat masyarakat optimis. Konsep “Satrio Piningit” sebenarnya hidup dalam mitologi Jawa. Dalam mitos-mitos Jawa kuno “Satrio Piningit” dipahami sebagai pemimpin alternatif yang pada awalnya tidak muncul dalam bursa calon pemimpin yang diunggulkan. “Satrio Piningit” bisa menjadi harapan (optimis) jika berkoalisi dengan partai yang punya etika politik dan idealisme, tetapi seandainya tidak malah sebaliknya karena akan terkooptasi oleh kepentingan partai politik yang mengusungnya.

Tulisan ini mempunyai beberapa tujuan sehubungan dengan Pilpres 2014 mendatang. Pertama, tulisan ini ingin berkontribusi dalam diskursus tentang Pilpres 2014 dalam kaitannya dengan arus globalisasi yang

semakin “deras.” Upaya ini sebagai langkah mengajak masyarakat untuk ikut menentukan masa depan Indonesia dengan cara memilih kandidat secara benar pada Pilpres 2014. Saat kampanye para capres biasanya menyampaikan janji-janji yang seringkali terlupakan ketika sudah menjadi Presiden. Jelang Pilpres 2014 tim sukses dari kandidat presiden tertentu bukan mustahil memberi iming-iming agar memilih kandidat yang diusungnya. Kedua, tulisan ini juga ingin menggugah kesadaran masyarakat soal pentingnya Indonesia berperan dalam isu-isu global. Isu-isu global ke depan berkembang semakin kompleks sehingga setiap negara semakin sengit dalam memperjuangkan kepentingannya. Dalam konteks ini lah, kandidat presiden yang memiliki kepedulian dan kapabilitas dalam mengelola kepentingan nasional dan isu-isu global dipandang memiliki nilai tambah dalam Pilpres 2014 jadi patut memperoleh dukungan.

Fokus tulisan ini adalah masalah momentum Pilpres 2014 yang berlangsung di tengah krisis kepemimpinan nasional, sementara itu tantangan globalisme makin berat dan kompleks. Pilpres 2014 merupakan momen yang sulit bagi masyarakat Indonesia untuk menentukan pilihannya karena tidak banyak pilihan capres yang potensial untuk menjawab tantangan globalisasi. Capres yang akan tampil diragukan kemampuan untuk mengelola kekuatan nasional menjadi jawaban atas isu-isu global. Pengalaman Pilpres sebelumnya tidak banyak capres yang punya kapabilitas untuk bisa berkiprah pada forum global maupun regional, di lain pihak tantangan global ke depan semakin berat dan kompleks bahkan bisa mengancam eksistensi Indonesia jika tidak memperoleh penanganan secara benar.

## **Konsep Kepemimpinan “Barat” Dan “Timur”**

Dalam mazhab Realis, masalah kepemimpinan dilihat sebagai salah satu dari elemen kekuatan nasional (*element of national power*) yang keberadaannya dipandang strategis. Kualitas kepemimpinan nasional dipandang punya korelasi dengan kekuatan nasional suatu negara. Kemampuan seorang pemimpin dalam melakukan inovasi teknologi dan mengembangkan strategi, khususnya strategi

militer sangat menentukan kekuatan nasional suatu negara. Seorang pemimpin yang punya keunggulan dalam kedua aspek tersebut punya peluang lebih besar untuk memainkan peran melalui negaranya dalam pentas internasional, sebaliknya seorang pemimpin yang tidak punya kedua ciri atau kepribadian di atas tidak bisa diharapkan banyak untuk dapat berkiprah dalam pentas internasional yang penuh ketidakpastian dan terkadang anarkis.

Realisme politik memformulasikan prinsip kepemimpinan bahwa seorang pemimpin yang ideal itu memiliki kombinasi dua sifat yakni berkarakter kuat dan cerdas. Pandangan ini merujuk pada buah pikiran Machiavelli yang mengembangkan ajarannya bahwa seorang pemimpin itu hendaknya punya kombinasi antara sifat-sifat singa dan serigala sehingga negaranya disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Dalam sejarah Eropa, Prusia di bawah pimpinan Frederick yang Agung merupakan negara adidaya yang mengimbangi negara adidaya lainnya, seperti: Prancis, Inggris, dan Rusia. Kepemimpinan ini dipandang ideal oleh kaum Realis karena negara mencerminkan kekuatan dan kecerdasan. Negara ini mampu mengembangkan kemampuan tempur pasukannya dan teknologi militer. Dalam sejarah kepemimpinan Indonesia, Sukarno dan Suharto juga cukup disegani dan ditakuti di Asia Tenggara karena keduanya punya karakter seperti yang diisyaratkan oleh Realisme politik yaitu kuat dan cerdas. Jadi, pesan yang bisa diambil sebuah negara jika ingin punya kontribusi penting dalam politik global perlu dipimpin oleh seorang Presiden yang punya watak kuat dan cerdas.

Disamping itu, Ki Hajar Dewantara menyampaikan pandangannya tentang kepemimpinan. Beliau membagi tiga kemampuan yang perlu dimiliki seorang pemimpin, yaitu: *Ing ngarsa sung tuladha* (mampu memberi contoh yang baik), *Ing madya mangun karsa* (mampu memberi motivasi guna mencapai tujuan), dan *Tut wuri handayani* (mampu memberi arahan kepada bawahan).<sup>1</sup>

Konsep kepemimpinan Ki Hajar Dewantara mengandung beberapa butir gagasan. Dalam hal ini, gagasan tentang ketauladanan atau moral, motivasi, dan kontrol. Ketiga butir pemikiran

beliau sangat mendasar, sederhana, tetapi cukup mewadahi aspek-aspek penting dari manajemen kepemimpinan. Bahkan, gagasan ini disampaikan sudah beberapa dasawarsa yang lalu, tetapi tidak kalah dengan ide-ide kepemimpinan atau manajemen modern yang disampaikan oleh pakar-pakar dari “Barat.” Konsep tersebut masih relevan untuk menjawab masalah-masalah yang terkait dengan aspek kepemimpinan dari organisasi modern karena pada hakekatnya pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan inti dari manajemen kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Konsep kepemimpinan Ki Hajar Dewantara dipandang sebagai konsep yang melengkapi model kepemimpinan “Barat.” Konsep kepemimpinan disampaikan oleh Realisme Politik mengutamakan kekuatan dan kecerdasan, ciri ini sesuai dengan nilai-nilai yang memang dianut oleh ilmuwan “Barat”. Konsep ini dikombinasikan dengan konsep kepemimpinan Ki Hajar Dewantara yang lebih mengedepankan moral dan ketauladanan dan berasal dari “Timur.”

Pada dasarnya ketiga butir kepemimpinan di atas merupakan aspek kunci dalam manajemen kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik harus punya moral dalam arti memberi contoh perbuatan yang baik dan menjaga perilakunya agar selaras dengan moral dan etika. Seorang pemimpin juga harus memotivasi bawahannya agar bertindak sesuai dengan fungsi-fungsi yang diembannya. Dalam memberi motivasi juga memperhatikan moral atau etika sehingga bisa diterima dengan baik oleh bawahannya. Akhirnya seorang pemimpin juga harus mengawasi seluruh fungsi-fungsi organisasi yang berada di bawah tanggungjawabnya. Pengawasan ini dilakukan agar fungsi-fungsi organisasi yang dilakukan oleh bawahan dipastikan berjalan dengan baik atau sesuai dengan kaedah-kaedah organisasi. Yang juga perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan kontrol juga memperhatikan etika atau moral yang berlaku agar fungsi pengawasan dapat diterima dengan baik oleh bawahan dan dilaksanakan dengan rasa penuh tanggungjawab dan rasa hormat kepada pimpinannya.

<sup>1</sup> Aulia Rachma, *Kepemimpinan Ideal menurut Ki Hajar Dewantara*, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), 2012, diakses pada tanggal 7 Mei 2013.

## **Kepemimpinan Presiden-Presiden Indonesia di Tengah Tantangan Global**

Berikut ini dipaparkan catatan tentang Presiden-Presiden Indonesia di tengah tantangan global. Dalam konteks tantangan global ini tentu saja isunya berbeda dari Presiden yang satu dengan yang lainnya. Setiap Presiden punya tantangan yang harus yang dihadapi sesuai dengan jamannya.

### **1. Sukarno di Era Orde Lama**

Sukarno menghadapi tantangan global pada jamannya sendiri. Saat itu Sukarno berusaha menghindari untuk tidak terjebak ke dalam konflik global antara blok “Barat” melawan blok “Timur” atau menegakkan prinsip bebas aktif. Sukarno berusaha menegakkan prinsip bebas aktif di tengah-tengah tarikan pengaruh global Soviet dan Amerika Serikat (AS). Oleh karena itu, Sukarno bergabung dengan gerakan Non-Blok. Sebuah perkumpulan negara-negara berkembang yang ingin punya posisi politik sendiri di luar Blok “Barat” dan Blok “Timur.” Dengan kata lain, ini suatu gabungan negara-negara yang tidak ingin terlibat dalam konflik global yang sedang terjadi saat itu. Tambahan lagi, Indonesia punya posisi geo-politik strategis. Indonesia berada di antara benua Australia dan Asia, serta terbentang antara Samudra Pasifik dan Hindia. Konsekuensinya posisi geografis Indonesia menjadi jalur transportasi lalu lintas dunia yang punya nilai strategis bagi negara-negara besar seperti Soviet dan AS.

Sukarno punya peran membangun solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika. Sukarno menggunakan solidaritas ini untuk perjuangan dekolonisasi. Seperti diketahui, saat itu masih ada sejumlah negara di Asia dan Afrika yang punya masalah dengan kolonialisme, termasuk Indonesia yang sedang memperjuangkan pembebasan Irian Barat yang dipandang oleh Sukarno sebagai upaya melawan sisa-sisa kolonialisme Belanda di Indonesia. Sukarno diterima sebagai pemimpin di kedua kawasan ini. Beberapa negara di Afrika mengabadikan nama Sukarno untuk berbagai hal, sebagai rasa simpatik rakyat negara tersebut kepada Sukarno. Salah satu peristiwa penting yang dilakukan Indonesia saat itu adalah diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun

1955. Acara ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara dari kedua kawasan itu. Boleh dikatakan ini sebagai puncak dari keberhasilan Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Ali Satroamidjojo membangun solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang bermuara kepada lahirnya gerakan Non-Blok.

Kepentingan nasional Indonesia yang diperjuangkan oleh Sukarno di tengah sengitnya konflik global saat itu adalah mengembalikan Irian Barat. Diplomasi panjang Presiden Sukarno, Menteri Luar Negeri Subandrio dan sejumlah diplomat ulung akhirnya berhasil mengembalikan Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Belanda mengulur-ulur perundingan Irian Barat. Belanda-Indonesia melakukan perundingan Irian Barat sejak tahun 1950, tetapi selalu gagal di tengah jalan. Sengketa ini dengan keterlibatan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan AS dapat diselesaikan melalui Perjanjian New York tahun 1962 yang dilanjutkan dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) atau referendum tahun 1969. Sukarno tidak terseret oleh arus konflik global “Barat” melawan “Timur”, tetapi justru berhasil memanfaatkan konflik global itu untuk kepentingan nasional Indonesia yaitu mengembalikan Irian Barat. Dalam hal ini, Sukarno mendatangi AS maupun Soviet untuk menggalang dukungan politik dan militer melawan Belanda dalam sengketa Irian Barat.

### **2. Suharto di Era Orde Baru**

Tantangan yang dihadapi Suharto adalah mewujudkan pembangunan nasional. Suharto ingin fokus melakukan pembangunan ekonomi. Upaya ini berkaitan dengan situasi dimana Suharto tampil menjadi presiden di saat ekonomi Indonesia berantakan. Oleh karena itu, Indonesia mengundang modal asing sebanyak-banyaknya untuk masuk ke Indonesia guna menjadi “motor” penggerak perekonomian nasional. Hal ini membuahkan hasil yaitu terbentuknya *Inter Governmental Group in Indonesia* (IGGI), suatu kelompok negara-negara pemberi pinjaman kepada Indonesia, akhirnya forum ini dibubarkan sendiri oleh dan diganti menjadi *Consultation Group in Indonesia* (CGI) karena saat itu pihak Belanda sebagai negara koordinator dinilai oleh Suharto terlalu intervensi soal dalam negeri Indonesia. Pembangunan nasional memerlukan lingkungan

regional yang kondusif. Indonesia dapat melakukan pembangunan nasional dengan baik jika didukung lingkungan tetangga yang stabil dan damai sehingga Suharto aktif membentuk perhimpunan negara-negara Asia Tenggara yaitu ASEAN tahun 1967.

Suharto dinilai punya andil besar dalam terbentuknya ASEAN. Suharto seperti dikatakan di atas berkepentingan kawasan Asia Tenggara yang damai dan stabil. Seperti diketahui bahwa pada masa itu Asia Tenggara diganggu oleh konflik Indocina. Sebenarnya, upaya ini tidak lepas dari skenario AS, ASEAN dibangun untuk membendung meluasnya pengaruh komunisme dari Indocina. Ide ASEAN disampaikan oleh Kennedy untuk mengimbangi komunisme di Indocina jadi Suharto dalam hal ini hanya melaksanakan gagasan Kennedy yang kebetulan cocok dengan keinginannya. Untuk mendapatkan dukungan negara tetangga atas keinginannya itu, Suharto mengakhiri konflik Indonesia dengan Malaysia. Mengingat di masa Sukarno Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia yang ditandai dengan slogan Sukarno yang terkenal “ganyang Malaysia” (serbu Malaysia). Suharto mengirim pembantu dekatnya seperti Amir Mahmud untuk mempersiapkan perdamaian dengan Malaysia. dan disambut baik oleh pemimpin negara tersebut.

Kepentingan nasional Indonesia di era Suharto adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dalam konteks Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Pembangunan di sini dibedakan menjadi pembangunan material yang dicapai melalui program kerja sama dengan negara maju di bidang: perdagangan, investasi, dan pengembangan industri, berikutnya pembangunan spiritual yang meliputi upaya membangun dan mempertahankan; kemandirian, kedaulatan, kemerdekaan, budaya nasional dan nilai-nilai tradisional.<sup>2</sup> Dalam hal ini, pembangunan nasional diformulasikan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Haluan negara ini berfungsi memberi arah kepada kebijakan nasional selama lima tahun<sup>3</sup>, agar kebijakan nasional yang dipilih dan dilakukan sejalan dengan arah pembangunan

<sup>2</sup> Gordon Hein, “Basic Principal of Indonesia Foreign Policy,” dalam *Soeharto's Foreign Policy: Second-Generation Nationalism in Indonesia*, (Berkeley: Department of Political Science, University of California, 1986), hlm. 4.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

nasional yang dimaksud.

### **3. B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono di Era Orde Reformasi**

Adapun tantangan global yang dihadapi Presiden-Presiden Indonesia di era reformasi adalah melawan radikalisme atau terorisme. Sejumlah umat Islam Indonesia sengaja pergi ke daerah konflik seperti: Afganistan, Mindanao (Filipina Selatan), Palestina, Pakistan. Kepergian mereka ada yang bermotif politik/militer dan adapula yang bermotif kemanusiaan. Setelah pulang ke Indonesia, sebagian dari mereka memanfaatkan pengalamannya militernya di luar negeri sesuai dengan kepentingannya. Kondisi sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya, di tanah air dalam pemahaman mereka merugikan umat Islam. Pengalaman batin selama di daerah konflik mendorong sikap anti AS karena dinilai bertanggungjawab atas kesengsaraan umat Islam, sebaliknya timbul empati kepada umat Islam di daerah konflik. Situasi kejiwaan yang tidak puas dan marah ini memperoleh dukungan dari luar negeri misalnya dari ahli perancang bom Malaysia yaitu Dr. Azhari dan dan ahli indoktrinasi bernama Nurdin M. Top. Akibatnya, terjadi aksi teror di Indonesia dengan kuantitas dan kualitas daya hancur yang tinggi yaitu mulai dari aksi bom Bali sampai dengan aksi-aksi bom di Jakarta.

Pemerintah merespon aksi teror ini dengan mendirikan Densus 88 anti terror. Densus 88 dibentuk untuk mengkonter aksi teror dan mendeteksi sel-sel terorisme di masyarakat. Dengan kelebihan dan kekurangannya, Densus 88 cukup berhasil melakukan misinya karena bisa melumpuhkan Dr. Azhari dan Nurdin M. Top, walaupun ini bukan sama sekali menghilangkan teror di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga memberi hukuman berat bagi pelaku teror yaitu hukuman mati dikenakan bagi Imam Samudra dan Amrozi. Sayangnya langkah-langkah tegas Pemerintah Indonesia berhasil mengurangi aksi teror di Indonesia, tetapi tidak menghilangkan akar persoalan sama sekali karena masih ada aksi-aksi teror oleh jaringan teror baru.

Kepentingan nasional Indonesia di era reformasi ini adalah pemulihan ekonomi nasional dan mengamankan serta melindungi

masyarakat dari terorisme. Presiden Habibie mencoba mengembangkan kerja sama ekonomi dengan Eropa khususnya dengan Jerman. Habibie menghidupkan kembali forum kerja sama ekonomi Indonesia-Jerman (ECONID) yang sebenarnya sudah ada sejak era kolonial. Upaya ini mendorong ECONID cukup marak kegiatannya karena Presiden pertama di era reformasi ini punya nama yang harum di Eropa khususnya di Jerman. Dia seorang ahli konstruksi pesawat terbang cukup menonjol di Eropa khususnya di Jerman. Habibie berhasil mendekatkan hubungan Indonesia-Jerman, sayangnya hal ini tidak berlanjut terus setelah beliau turun dari jabatan Presiden Indonesia.

Sedangkan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masa kepemimpinannya banyak dilakukan untuk melakukan diplomasi global untuk perbaikan ekonomi. Ini sebagai upaya memberi informasi kepada dunia tentang keadaan sosial ekonomi dan politik Indonesia yang terbaru karena reformasi di Indonesia banyak mendapat sorotan masyarakat internasional. Langkah Gus Dur ini juga untuk menarik investor dan kerja sama ekonomi dengan negara lain. Indonesia sebagai negara yang sedang melakukan pemulihan ekonomi memerlukan investor asing sebanyak mungkin. Kecenderungan ini akhirnya membuat para investor memang banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia walaupun iklim investasi disini sebenarnya tidak begitu menguntungkan, karena masih ada kesan birokrasi dan regulasi di Indonesia belum siap untuk memikat investor asing agar menanamkan modalnya disini. Untuk mengimbangi kondisi yang demikian atau kondisi yang tidak menarik bagi investor, dibuatlah kebijakan liberalisme ekonomi. Kebijakan ini berdampak kepada lahirnya kelonggaran-kelonggaran kepada investor asing sehingga menimbulkan kritik di masyarakat bahwa Indonesia sekarang sudah terjebak pada rejim Neo-Liberalisme, yang lebih banyak menguntungkan investor asing.

Pada tahun 2003 Presiden Megawati dan Presiden Bush menandatangani perjanjian kerjasama anti teror di Bali. Dalam pandangan AS, Indonesia adalah negara yang rawan dengan aksi terorisme karena beberapa ledakan bom terjadi di Indonesia misalnya Bom Bali tahun 2002<sup>4</sup> dan peristiwa bom lainnya di

<sup>4</sup> Hermawan Sulistyono, *Bom Bali: Buku Putih tidak resmi Investigasi Teror Bom Bali*, (Jakarta:

Jakarta maupun tempat-tempat lain. Pemerintah Indonesia dan AS punya kesamaan kepentingan untuk bekerja sama mengeliminir terorisme di Indonesia dan di dunia. Terorisme telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat internasional sehingga perlu diatasi dengan segera dan bersama-sama. AS menetapkan Doktrin Bush sebagai rujukan untuk menghadapi terorisme. Yang salah satu butirnya adalah melumpuhkan lawan (teroris) terlebih dahulu sebelum mereka sempat menyerang, ini diterapkan ke Irak karena dicurigai negara ini punya kerja sama dengan jaringan teroris,<sup>5</sup> tetapi pada periode kedua kepemimpinan Presiden Bush terjadi perubahan kebijakan *counter of terror* dari represif menjadi persuasif. Pemerintah AS-Indonesia melakukan kerja sama karena keduanya punya kepentingan yang sama dalam soal terorisme. AS punya kebijakan menanggulangi teroris, demikian pula Indonesia. Akhirnya, keduanya membangun kerja sama penanggulangan teroris yang dilakukan dalam bentuk saling tukar informasi dan pengalaman.

Sedangkan, Presiden SBY berupaya meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-AS yang ditandai oleh penandatanganan perjanjian Kemitraan Komprehensif (*Comprehensive Partnership*) tahun 2011. Perjanjian ini berisi sejumlah prinsip yang mengatur kerja sama di bidang perdagangan, investasi, lingkungan hidup, pendidikan, ilmu pengetahuan, keamanan, energi, dan politik. Perjanjian ini sangat luas cakupannya sesuai dengan "Payung Kerjasama" yang melingkupinya, tetapi bidang yang sudah mulai digarap adalah pendidikan, lingkungan hidup, keamanan, dan politik. Hal ini bisa dilihat dari kunjungan kapal perang AS ke Surabaya yang diisi dengan bantuan medis oleh awak kapal perang AS tersebut kepada masyarakat kurang mampu. Perjanjian ini mendorong Indonesia dan AS untuk sama-sama membangun stabilitas, keamanan, dan politik di Asia-Pasifik. Baik AS maupun Indonesia punya kepentingan yang sama untuk mewujudkan hal di atas. Bagi Indonesia kawasan yang aman penting bagi terlaksananya pembangunan nasional yang berkelanjutan, sedangkan bagi

Pensil-324, 2002), hlm. 58.

<sup>5</sup> "The Bush Doctrine: The Iraq War may only be the Beginning of One an Ambition American strategy to confront dangerous regimes and expand Democracy in the world," <http://www.crf-usa.org/war-in-iraq/bush-doctrine.html>, diakses pada tanggal 11 Juni 2013.

AS kawasan yang aman penting untuk menjaga kepentingan jalur transportasi lautnya dan kepentingan ekonominya. Langkah-langkah ini bisa dilihat dari diselenggarakannya *Jakarta Open Forum* sejak tahun 2012 baik di Jakarta maupun di Washington DC. Acara ini semacam seri diskusi yang dihadiri pejabat dari AS dan masyarakat Indonesia untuk mendiskusikan berbagai isu strategis khususnya yang berada dalam tema payung Kemitraan Komprehensif.

## Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional

Bursa Capres untuk Pilpres pada 9 Juli 2014 pada awalnya banyak dan dari beragam profesi, tetapi akhirnya hanya dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhasil lolos ikut Pilpres. Dua pasang capres dan cawapres itu adalah Prabowo Subianto/Hatta Rajasa dan Joko Widodo/Jusuf Kalla.

### 1. Capres dan Demokrasi

Indonesia membuka kesempatan bagi semua warga negara untuk menjadi pemimpin nasional sejauh memenuhi ketentuan. Oleh karena itu pada awalnya begitu banyak tokoh yang dicalonkan menjadi capres. P2P-LIPI melakukan survei pada bulan Mei 2013 untuk mengetahui potensi para capres tersebut. Hasil survei menunjukkan dalam kategori tokoh populer, Rhoma Irama berada di urutan ke-3 dengan perolehan suara 89,2% dari yang tertinggi 93,2% yaitu Ketua Umum PDI-P Megawati, tetapi begitu masuk kategori elektabilitas tokoh, Rhoma Irama hanya mencapai urutan ke-6 dengan angka capaian 3.5 dari yang tertinggi 22.6 yaitu kader PDI-P Joko Widodo.

Setelah mengerucut hanya ada dua capres/cawapres, banyak tokoh dan partai politik melakukan perubahan strategi; semula partai itu mengusung kadernya sendiri, tetapi akhirnya mendukung tokoh dari partai lain. PKS, PAN, dan Golkar pada awalnya mencalonkan kadernya sendiri menjadi Presiden, tetapi akhirnya hanya mendukung Prabowo. PAN berhasil mengantar kadernya, Hatta Rajasa, menjadi cawapres mendampingi Prabowo. PPP sejak awal tidak mencalonkan kadernya menjadi Presiden, sempat mengalami konflik internal, tetapi akhirnya mendukung Prabowo.

Sejak awal, Partai Nasdem tidak terlalu jelas posisinya dalam bursa Pilpres 2014, dalam hal mencalonkan kadernya atau tidak, sedangkan di PKB berkembang isu mencalonkan Rhoma Irama, Mahmud MD dan Jusuf Kalla. Akhirnya Partai Nasdem mengusung Jusuf Kalla menjadi cawapres mendampingi Joko Widodo.

Menjelang Pemilu, *Presidential Threshold* (PT) atau syarat minimum pencalonan Presiden menjadi polemik. PT menurut UU Pilpres yang berlaku adalah 20% dari komposisi kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. PT ditolak oleh partai-partai kecil seperti Partai Hanura, PKS, Gerindra, PPP, dan PBB. Mereka sepakat mendukung revisi UU Pilpres, sebaliknya partai-partai besar menolak UU Pilpres seperti: PDI-P, Golkar, PAN, PKB, dan Demokrat.<sup>6</sup> Bagi partai kecil, keberadaan PT merupakan kebijakan inkonstitusional karena bertentangan dengan pasal 6 a UUD 1945 yang menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu berhak mengajukan Presiden dan calon presiden. Dalam upaya hukum, Partai Bulan Bintang melalui Yusril Ihza Mahendra mengajukan *judicial review* terhadap pasal 3, 9, 14, 112 UU No. 42/2008 tentang Pilpres,<sup>7</sup> tetapi pada 20 Maret 2014 MK melalui diktumnya menolak upaya hukum tersebut. Dengan demikian, PT tetap berlaku seperti semula. (Lihat Tabel 1).

Pada Pileg 9 April 2014 tidak ada satu partai pun yang mencapai angka *Presidential Threshold*. PDI-P sebagai partai yang berhasil meraih suara terbanyak berkoalisi dengan partai-partai lain guna menyukseskan capres/cawapresnya yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sedangkan, Golkar partai yang memperoleh suara terbanyak kedua bergabung dengan Gerindra untuk mendukung capres/cawapres dari partai ini yaitu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

### 2. Kriteria Kepemimpinan

Masyarakat perlu menyandingkan capres Pilpres

<sup>6</sup> Jamal Wiwoho, "Presidential Threshold: ya atau tolak, <http://www.koran-sindo.com/node/333149>, diakses pada tanggal 13 Juni 2013.

<sup>7</sup> Desk Informasi, "Tolak Batalkan Presidential Threshold, Ketua MK: Diktum Gugatan Yusril tidak tepat", <http://www.setkab.go.id/berita-12511-tolak-batalkan-presidential-threshold-ketua-mk-diktum-gugatan-yusril-tidak-tepat.html>, diakses pada tanggal 13 Juni 2013.

**Tabel 1.** Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Parpol dan Kursi di DPR dalam Pemilu Legislatif 2014<sup>8</sup>

No.	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1	PDI-P	23.681.471	109
2	Partai Golkar	18.432.312	91
3	Partai Gerindra	14.760.371	73
4	Demokrat	12.728.913	61
5	PKB	11.298.957	47
6	PAN	9.481.621	49
7	Partai Nasdem	8.402.812	35
8	PKS	8.480.204	40
9	PPP	8.157.488	39
10	Partai Hanura	6.579.498	16
11	PBB	1.825.750	0
12	PKPI	1.143.094	0
Jumlah suara semua Parpol		124.972.491	560

Sumber: Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/2014

2014 dengan konsep kepemimpinan yang ada pada bagian sebelumnya. Jika Indonesia ingin mampu menjawab tantangan global, capres yang dipilih sebaiknya punya watak dan nilai-nilai yang mencerminkan seorang pemimpin yang kuat dan cerdas seperti yang terkandung dalam paham pemikiran yang dianut oleh kaum Realis. Pada waktu yang bersamaan capres yang bersangkutan juga mampu memberi ketauladanan yang baik atau memperhatikan aspek-aspek norma dan etika yang berlaku di masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Selain dari itu, dia juga mampu memberi motivasi kepada bawahannya bahkan memberi motivasi kepada rakyat Indonesia maupun masyarakat internasional.

Capres yang relevan tampil berdasarkan kriteria di atas adalah capres yang mampu memimpin dengan efektif sehingga punya dukungan luas secara nasional. Kepemimpinan demikian bisa terlaksana jika ada watak yang tegas, kuat, berwibawa, dan punya rekam jejak yang baik, artinya tidak pernah melanggar hukum maupun norma. Terkesan kriteria ini hanya menjangkau capres yang terlalu ideal, tetapi capres yang demikian memang yang paling tepat untuk memimpin Indonesia ke

<sup>8</sup> Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tk. I, DPRD tk II dalam Pemilu 2014, [http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014\\_Penetapan\\_Hasil\\_Pileg.pdf](http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014_Penetapan_Hasil_Pileg.pdf), diakses pada tanggal 12 Juni 2013.

depan. Partai politik seharusnya memberi jalan kepada tokoh-tokoh yang punya kriteria demikian. Bahkan partai-partai politik seharusnya berupaya mencari tokoh-tokoh yang punya kriteria demikian untuk diusung menjadi capresnya. Sayangnya tokoh-tokoh yang punya kriteria demikian justru tidak terpanggil untuk terjun ke bursa capres dalam Pilpres mendatang.

Jika tampil capres yang punya kepemimpinan efektif maka capres bersangkutan jika terpilih mampu memimpin kawasan yang melingkupi Indonesia atau kawasan terdekat. Capres tersebut jika menjadi Presiden Indonesia mampu memimpin negara-negara di kawasan terdekat khususnya ASEAN karena Indonesia secara tradisional menjadi pemimpin dari organisasi regional yang sudah berdiri sejak tahun 1967 ini.

Konsekuensinya, capres itu juga punya kemampuan memimpin di tingkat global, walaupun ini tidak mudah karena masih perlu memperhitungkan kekuatan nasional. Indonesia saat ini sudah menjadi bagian dari organisasi di tingkat global seperti G-20, Gerakan Non Blok, PBB dengan sejumlah sub organisasi yang berada di bawahnya yaitu: WHO (World Health Organization), ILO (International Labour Organization), FAO (Food and Agriculture Organization), UNESCO (United Nations Education Scientific and Cultural Organization), IMF (International Monetary Fund), WFP

(World Food Programme), WHO (World Health Organization), IMO (International Maritime Organization), dan IAEA (International Atomic Energy Organization).<sup>9</sup>

## **Pemimpin yang Mampu Menjawab Tantangan Global**

Capres dalam Pilpres 2014 punya tantangan di tingkat regional maupun global. Kemampuan diplomasi sangat penting untuk menjawab tantangan tersebut. Oleh karena itu, kemampuan diplomasi ini ada baiknya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihan dalam Pilpres tersebut.

### **1. Diplomasi Global dan Regional**

Di era globalisasi, kepala negara yang punya kemampuan diplomasi menguntungkan negara tersebut dalam interaksinya di dalam sistem internasional. Posisi seorang kepala negara adalah strategis. Kepala negara lebih berkuasa, dibandingkan Menteri Luar Negeri atau para diplomat. Komunikasi langsung yang dilakukan kepala negara lebih efektif mempengaruhi arah kebijakan luar negeri. Sejumlah forum jadi ajang diplomasi. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) merupakan ajang perjuangan kepentingan nasional suatu negara, misalnya saja KTT ASEAN, KTT G-20, KTT APEC, KTT Non-Blok. Kecakapan diplomasi kepala negara di forum internasional sangat menentukan upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya atau menjadi ukuran pengaruh negara yang bersangkutan.

Jika Indonesia ingin punya kontribusi atas tantangan global, kemampuan diplomasi seorang Presiden sangat diperlukan. Sehubungan dengan hal itu, capres Pilpres 2014 idealnya punya kemampuan diplomasi di forum global. Bagaimana mungkin Indonesia bisa menjawab tantangan global jika pemimpinnya tidak punya kemampuan diplomasi yang memadai. Oleh karena itu, capres dalam Pilpres 2014 hendaknya punya kemampuan bernegosiasi dengan pihak lain. Memang sesuatu yang tidak mudah untuk mengukur dan mengetahui calon yang punya kemampuan di bidang itu. Oleh

<sup>9</sup> Structure and Organization UNO”, <http://www.un.org/en/aboutun/structure/index.shtml>, diakses pada tanggal 13 Juni 2013.

karena itu, masyarakat perlu menyuarakan hal ini sejak jauh-jauh hari sebelum Pilpres 2014 agar capres yang tampil kelak punya kriteria yang diharapkan seperti tersebut di atas. Capres tersebut juga diisyaratkan punya pengalaman dalam masalah-masalah atau tantangan global. Dengan pengalaman, capres yang bersangkutan jika kelak terpilih menjadi Presiden Indonesia dan berada di tengah-tengah forum internasional sudah tidak canggung lagi, bahkan sudah lebih mudah untuk ikut menyelesaikan masalah-masalah global, khususnya yang menyangkut kepentingan nasional Indonesia. Jadi, Presiden terpilih bisa memberi kontribusi nyata kepada tantangan global dan regional.

### **2. Kepentingan Nasional Versus Kepentingan Global**

Banyak negara di dunia punya kepentingan di Indonesia dan sekitarnya. Kategori kepentingan itu bisa dalam kategori kepentingan politik, keamanan, ekonomi dan lainnya. Dari segi ekonomi, Indonesia negara yang kaya dengan sumberdaya alam sehingga negara lain punya kepentingan di Indonesia. Negara, seperti Jepang dan Cina, sangat berkepentingan untuk membeli gas alam cair dari Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang padat membuat Cina mendekati Indonesia karena punya kepentingan pasar untuk produk-produk industrinya. Selanjutnya, AS punya kepentingan keamanan di wilayah Indonesia dan sekitarnya. AS perlu akses untuk dapat melewati wilayah perairan Indonesia bagi jalur transportasi kapal-kapal perangnya yang melakukan perjalanan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selat Lombok dan Selat Karimata merupakan jalur pelayaran yang kerap digunakan oleh kapal-kapal AS.

Sebaliknya, Indonesia juga punya kepentingan nasional yang perlu dikawal dan diperjuangkan di forum internasional. Di bidang ekonomi, Indonesia berkepentingan menjaga pasar bagi produk industri dalam negerinya agar tidak gulung tikar karena tak mampu bersaing dengan produk-produk Cina. Namun demikian, Indonesia sebagai anggota ASEAN sudah menandatangani kesepakatan perdagangan bebas dengan Cina atau CAFTA (Cina-ASEAN Free Trade Area). Penandatanganan ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan tidak dilakukan kajian yang mendalam dan mendengar pendapat dari industri kecil

dan menengah terlebih dahulu. Produk Cina membanjiri pasar Indonesia yang terdiri dari beragam produk: ikat pinggang, alat tulis kantor, senter, perkakas rumah tangga, kosmetik, obat-obatan, mie instan, sampai dengan mainan anak-anak. Hal ini membuat industri yang menghasilkan produk serupa di Indonesia tak mampu bersaing karena produk Cina harganya lebih murah. Industri kecil di Cina bisa menekan ongkos produksinya karena adanya dukungan signifikan dari pemerintahnya di sektor permodalan maupun pemasaran, sedangkan pemerintah Indonesia bersikap sebaliknya yaitu tidak memberi dukungan yang signifikan kepada industri kecil dan menengah, baik dari segi permodalan maupun pemasaran. Sikap Cina memproteksi industri kecil dan implisit menutup impor sudah jadi rahasia umum. AS sering memprotes kebijakan pemerintah Cina ini karena membuat neraca perdagangannya rugi, sedangkan pemerintah Indonesia diam saja, seolah-olah memberi kesempatan kepada produk Cina untuk menguasai pasar Indonesia dan menonton industri kecilnya bangkrut satu persatu. Ini dilakukan agar terkesan Indonesia adalah negara yang konsisten dengan perdagangan bebas, sebaliknya tidak peduli dengan nasib industri kecilnya yang “menjerit”.

Fenomena di atas menggambarkan bahwa industri kecil menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden SBY sebagai puncak pimpinan nasional tidak berusaha melindungi industri kecil dan menengah di dalam negeri dengan sungguh-sungguh. Kesulitan yang dialami industri kecil dan menengah tidak terjadi jika pemerintah dalam hal ini Presiden bersikap tegas melalui Kemenperindag Indonesia. Pemerintah melindungi pengusaha kecil dan menengah tertent dan memang layak diberi proteksi, karena ini memang dimungkinkan dalam ASEAN-Cina Free Trade Area (ACFTA). Sikap tidak tegas dan ingin mendapat pencitraan di dunia internasional merugikan industri kecil dan menengah dalam negeri Indonesia, sebaliknya menguntungkan pihak asing (Cina). Pertanyaan kritisnya, mengapa harus mentolerir pihak asing dan mengorbankan rakyat sendiri?, bukankah, filosofinya pemimpin itu melindungi rakyatnya?.

### **3. Manajemen Keseimbangan Kepentingan**

Tantangan yang dihadapi oleh Presiden Indonesia di masa depan adalah mengelola konflik dan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan global. Seorang Presiden perlu menyadari bahwa kepentingan nasional tetap prioritas, tetapi tetap menghormati kepentingan pihak lain. Kesadaran semacam ini diperlukan di saat Indonesia dihadapkan pada perbedaan kepentingan atau konflik kepentingan dengan kepentingan global. Faktanya, saat ini pemerintah Indonesia seringkali bersikap lemah jika dihadapkan pada desakan kepentingan global atau regional. Lihat saja sikap Indonesia dalam isu perdagangan bebas dan hak paten di WTO dan pasar bebas ASEAN-Cina (ACFTA). Sebagai pembanding, Cina adalah negara yang cerdas, di forum WTO negara ini tidak mau patuh begitu saja atas isu hak paten dan perdagangan bebas karena ingin melindungi kepentingan industrinya, tetapi di forum ACFTA negara ini mampu mendorong Indonesia dan negara ASEAN lainnya patuh pada isu perdagangan bebas. Akibatnya, produk-produknya leluasa membanjiri pasar Indonesia maupun ASEAN dan pengusaha nasional Indonesia satu-persatu bangkrut. Kesimpulannya pemerintah Cina berani melindungi industrinya, walaupun harus dikecam masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia tidak berani melindungi rakyatnya, tetapi diberi “tepuk tangan” oleh masyarakat internasional.

Di samping itu, Presiden Indonesia di masa mendatang harus mampu melindungi kepentingan nasional dari aspek ipoleksosbud. Dari aspek ideologi dan politik, Presiden mendatang idealnya seorang yang mampu mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila memiliki fungsi sebagai pandangan hidup dan dasar negara, tetapi bukan sebagai alat kepentingan Pemerintah seperti di jaman Orde Baru. Pancasila sebagai pandangan hidup maka multikulturalisme adalah suatu keniscayaan. Pancasila berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika yang memberi ruang kepada nilai-nilai pluralisme. Masyarakat Indonesia hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Dalam konteks politik, Pancasila menjadi sesuatu etika politik yang mendasari perilaku para politisi. Pancasila diperjuangkan agar menjadi sumber hukum dari produk-produk hukum baik yang dihasilkan

oleh lembaga legislatif maupun eksekutif. Produk hukum di era reformasi belum merujuk pada Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai elemen dasar perumusan segala produk hukum dan etika di Indonesia. Karena mengabaikan hal tersebut, banyak undang-undang yang diuji materi dan dibatalkan oleh MK.

Selanjutnya secara politik, ideologi Pancasila diharapkan menjadi pelindung masuknya pengaruh nilai-nilai politik asing yang tidak sejalan dengan kepribadian Indonesia. Misalnya saja sistem pemerintahan yang dianut Indonesia pada era reformasi adalah sistem presidensial, tetapi pada kenyataan kehidupan politiknya lebih bercorak sistem parlementer khususnya demokrasi liberal. Kehidupan politik diwarnai oleh koalisi partai-partai berkuasa, partai oposisi, dominasi parlemen, transaksi/kompromi politik. Di lain pihak, demokrasi Pancasila yang bercirikan gotong royong dan kekeluargaan dalam proses politik sebenarnya lebih relevan dengan kultur bangsa Indonesia. Ironisnya tatanan politik ini malah diabaikan oleh para politisi sekarang karena dianggap identik dengan Orde Baru. Sesungguhnya, politisi perlu memberi tafsir baru terhadap Pancasila yang lebih relevan dengan masa kini. Yang perlu diperjuangkan oleh Presiden terpilih pada Pilpres 2014 dalam konteks menghadapi globalisasi adalah menjadikan Pancasila sebagai rujukan perilaku politisi dan sistem politik nasional.

Dalam konteks ekonomi, perdagangan bebas tentu saja bisa diakomodir sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Sikap komitmen kepada perdagangan bebas adalah baik, tetapi jika tidak disertai kesiapan yang serius oleh negara justru akan mematikan industri kecil dan menengah, khususnya jika banyak produk yang sejenis dengan produk dalam negeri masuk ke pasaran domestik. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara berkomitmen kepada perdagangan bebas atau melindungi produk dalam negeri. Jika terjadi konflik kepentingan seperti ini, seorang Presiden diharapkan jelas keberpihakannya kepada siapa. Presiden bisa melakukan langkah strategis dengan meminta menteri-menteri terkait untuk melakukan negosiasi ulang dengan negara lain yang produk-produknya membanjiri pasar domestik.

Setidaknya, upaya mengkompromikan kepentingan nasional dan kepentingan global merupakan upaya bertanggungjawab seorang pemimpin yang bijak. Kepentingan nasional tercermin dari aspirasi pengusaha kecil dan menengah yang produknya bersaing oleh produk negara asing. Kepentingan global tercermin dari isu perdagangan bebas yang ingin menguasai pasar Indonesia. Hal yang hakiki dari seorang kepala negara adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan global.

Indonesia kedepan sebaiknya dipimpin oleh seorang kepala negara yang bersedia menegosiasikan kepentingan negara yang sudah disepakati dan menolak kepentingan negara lain jika dipandang merugikan kepentingan nasional. Namun, renegotiasi dan penolakan kepentingan negara lain ini didasarkan pada semangat menghormati dan menjaga hubungan baik dengan negara lain, bukan penolakan yang semena-mena.

Negara yang mengklaim tatanan politiknya demokrasi, kepentingan nasional atau kepentingan rakyat seharusnya diutamakan. Azas demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat karena dalam kampanye seorang kandidat Presiden minta kepada rakyat agar mendukung dirinya. Oleh karena itu, ketika kandidat Presiden tadi sudah menang atau sudah menjadi Presiden giliran rakyat yang meminta perhatian. Disini, hak-hak dasar rakyat dan kepentingannya harus dipenuhi, dijaga dan diperjuangkan. Kalau ada negara yang mengklaim sistem politiknya demokrasi, tetapi Presidennya tidak memperjuangkan hak-hak dasar dan kepentingan rakyatnya, maka perlu dipertanyakan apakah negara itu memang demokrasi dalam arti yang sesungguhnya atau hanya demokrasi semu.

Dengan kata lain, kepentingan nasional merupakan refleksi kepentingan rakyat. Memperjuangkan kepentingan nasional berarti memperjuangkan kepentingan rakyat. Prinsip di atas berpijak pada pemahaman bahwa eksistensi suatu negara harus ada tiga komponen yaitu rakyat, wilayah, dan kedaulatan. Dengan demikian, keberadaan rakyat sifatnya strategis atau mutlak. Karena sifatnya strategis, maka logis jika kepentingannya mendapat perhatian khusus di dalam suatu negara. Disini yang dimaksud kepentingan rakyat adalah

kepentingan mayoritas penduduk negeri, bukan kepentingan elit saja. Dalam hal ini, sikap elit justru memfasilitasi kepentingan rakyat tersebut, karena rakyat berdaulat atas arah kebijakan yang ditempuh oleh para elit khususnya elit politik. Tidak boleh sebaliknya, elit politik justru memanfaatkan rakyat untuk kepentingannya sendiri, elit memperkaya dirinya sendiri dan mengabaikan rakyat yang telah memilihnya atau mengantarkannya kepada panggung politik.

## Penutup

Sejarah kepemimpinan nasional Indonesia telah menunjukkan bahwa Presiden-Presidennya di masa lalu telah menunjukkan kontribusi pada dunia sesuai tantangan dan jamannya masing-masing. Dimulai dari Era Orde Lama, kepemimpinan nasional didominasi oleh Presiden Sukarno sehingga kebijakan luar negeri Indonesia yang berciri *high profile* tidak lepas dari pengaruh Sukarno. Era Orde Baru kepemimpinan nasional didominasi oleh Presiden Suharto karena itu kebijakan luar negeri Indonesia yang *low profile*<sup>10</sup> juga tidak lepas dari pengaruh Suharto. Era Orde Reformasi kekuasaan dari pemimpin nasional didistribusi kepada pemimpin lembaga tinggi negara dan demokrasi dikawal ketat oleh rakyat sehingga seorang Presiden tidak lagi terlalu dominan dalam kehidupan politik. Di antara Presiden-Presiden di era ini adalah Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati, dan SBY. Setiap Presiden tersebut di atas memberi kontribusinya sesuai dengan tantangan dan zamannya. Sukarno memberi kontribusi kepada terciptanya solidaritas negara-negara Asia-Afrika atau negara-negara berkembang. Suharto memberi kontribusi kepada tercipta stabilitas dan keamanan Asia Tenggara khususnya melalui ASEAN. Presiden-Presiden di Era Reformasi

<sup>10</sup> Low profile sering digunakan untuk menggambarkan kebijakan Indonesia di era Soeharto yang cenderung hanya sibuk memberi perhatian pada persoalan domestik (inward looking). Soeharto pada waktu itu lebih fokus melakukan penataan Indonesia di dalam negeri atau melakukan pembangunan nasional. Hal ini bisa dipadankan dengan kebijakan AS yang disebut kebijakan introversi. Kebijakan introversi AS terjadi pada era Presiden Clinton yang fokus melakukan recovery ekonomi yaitu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

memberi kontribusi kepada dunia dengan cara membantu terwujudnya keamanan global melalui kerjasama pemberantasan terorisme dan mendorong terciptanya perdagangan internasional yang bebas dan meminimalisir hambatan-hambatan yang ada dalam sistem perdagangan internasional, terlepas dari kenyataan bahwa hal ini membawa akses yang tidak menguntungkan kepada industri kecil di dalam negeri.

Oleh karena itu, rakyat Indonesia melalui Pilpres 2014 diharapkan memilih seorang capres yang mampu berkontribusi terhadap tantangan regional maupun global. Dalam hal ini, pemimpin yang mampu berkontribusi adalah pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang disampaikan pada bagian sebelumnya. Kriteria yang dimaksud adalah 1). Berkepribadian kuat dalam arti seorang yang bersifat teguh dalam pendirian, punya prinsip dan keyakinan yang dipegang dengan erat, namun tetap terbuka bagi kebenaran yang datang dari luar 2). Punya tingkat kecerdasan di atas rata-rata sehingga mampu mengidentifikasi, merumuskan, menyimpulkan dan menyelesaikan masalah secara tepat dan akurat. 3). Menjunjung moral dan etika, termasuk di dalamnya mampu memberi ketauladanan yang baik dan mampu memotivasi serta mengontrol organisasi secara efektif.

Sejalan dengan hal itu, rakyat Indonesia melalui Pilpres 2014 diharapkan memilih seorang capres yang mampu menyeimbangkan kepentingan global dan kepentingan nasional. Globalisasi merupakan sesuatu keniscayaan yang melanda dunia termasuk Indonesia sehingga kehadirannya perlu diantisipasi. Yang perlu digarisbawahi, kehadiran globalisasi jangan sampai menjadi masalah yang tidak terpecahkan dengan baik, oleh karena itu sebaiknya pimpinan Indonesia di masa datang mampu mengubah masalah globalisasi menjadi tantangan yang mampu dipecahkan dengan baik. Indonesia jangan sampai berada dalam cengkraman globalisasi atau hanya menjadi ajang target kepentingan negara-negara lain, tetapi Indonesia jangan pula anti globalisasi karena dengan demikian Indonesia berarti anti terhadap masyarakat internasional dan mengisolir diri dari pergaulan internasional.

Kepentingan nasional merupakan pijakan seorang Presiden Indonesia dalam menyikapi

perkembangan globalisasi. Prinsip ini diperlukan agar perkembangan globalisasi tidak sampai merugikan kepentingan nasional Indonesia atau merugikan kepentingan rakyatnya. Seorang Presiden Indonesia idealnya mampu memanfaatkan perkembangan globalisasi untuk kepentingan nasionalnya sedemikian rupa agar globalisasi justru menguntungkan Indonesia atau memberi manfaat kepada rakyat. Hal itu bisa dilakukan jika Presiden Indonesia punya pengaruh untuk mendorong para pihak di forum internasional agar mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Gordon Hein. 1986. "Basic Principal of Indonesia Foreign Policy" dalam *Soeharto's Foreign Policy: Second-Generation Nationalism in Indonesia*. Berkeley: Department of Political Science, University of California.
- Hermawan Sulistyono. 2002. *Bom Bali: Buku Putih tidak resmi Investigasi Teror Bom Bali*. Jakarta: Pencil-324.
- Huntington, Samuel P. 2002. *The Clash of Civilization*. London: The Free Press.
- Ide Anak Agung Gde Agung. 1973. *Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965*. Paris: Mouton & Co.
- Morgenthau J. Hans. 1978. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf.
- "The Structure and Process of Foreign Policy Making." *Soehartos Foreign Policy: Second-Generation Nationalism in Indonesia*. Department of Political Science. University of California, Berkely.

### Jurnal

- Athiqah Nur Alami. 2011. "Profil dan Orientasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Orde Baru." *Jurnal Penelitian Politik* 8(2).
- Novotny, Daniel. 2004. "Indonesia Foreign Policy's: in Quest for the Balance of Threat." Faculty of Art and Social Science. University of New South Wales.

## Surat Kabar dan Website

- Aulia Rachma. 2012. "Kepemimpinan Ideal menurut Ki Hajar Dewantara". <http://kompasiana.com>.
- Desk Informasi. 2013. "Tolak Batalkan Presidential Threshold, Ketua MK: Diktum Gugatan Yusril tidak tepat". <http://www.setkab.go.id/berita-12511-tolak-batalkan-presidential-threshold-ketua-mk-diktum-gugatan-yusril-tidak-tepat.html>.
- Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, tdk I DPRD tk II dalam Pemilu 2014. [http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014\\_Penetapan\\_Hasil\\_Pileg.pdf](http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014_Penetapan_Hasil_Pileg.pdf).
- "Marzuki Usulkan Syarat Usung Capres Diturunkan Jadi 15 persen". <http://www.aktual.co/politik/190718marzuki-usulkan-syarat-usung-capres-diturunkan-jadi-15-perse>.
- Structure and Organization UNO*. <http://www.un.org/en/aboutun/structure/index.shtml>.
- The Bush Doctrine: The Iraq War may only be the Beginning of One an Ambition American strategy to confront dangerous rejimes and expand Democracy in the world*. <http://www.crf-usa.org/war-in-iraq/bush-doctrine>.
- "Oma Irama Capres". 2013. *Majalah Tempo*, Edisi April.
- "Sapi Berjanggut." 2013. *Majalah Tempo*, Edisi April.